

# INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : Mediator Hubungan Industrial
2. KODE JABATAN : 32.14-E07.01.05.01.
3. UNIT KERJA : Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
  - a. JPT Pratama :
  - b. Administrator :
  - c. Pengawas :
  - d. Pelaksana :
  - e. Jabatan Fungsional :
4. IKHTISAR JABATAN : "Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial."
5. KUALIFIKASI JABATAN :
  - a. Pendidikan Formal : S1/ DIV S-1/D-4 Ilmu Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial Politik/ Psikologi/ Relasi Industri/ Humaniora/ bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan instansi pembina
  - b. Pendidikan dan Pelatihan :
    - 1) Fungsional : Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial
    - 1) Teknis : Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial
  - c. Pengalaman Kerja : -
6. TUGAS POKOK

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Efektif	Kebutuhan Pegawai
1	Melaksanakan penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di kepolisian/ penyidik PNS	10	10	120	72000	0.0167
2	Laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan hubungan industrial	10	10	120	72000	0.0167

3	Melaksanakan penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan negeri	10	10	120	72000	0.0167
4	Melakukan pendampingan Hubungan Industrial terintegrasi pasca terjadinya kasus Hubungan Industrial berdampak wilayah/ nasional	10	10	120	72000	0.0167
5	Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Pengadilan hubungan industrial tingkat pertama/Mahkamah Agung dan tindak lanjutnya	10	10	120	72000	0.0167
6	"Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat berat"	10	10	120	72000	0.0167
7	Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat berat dalam bentuk Perjanjian Bersama	10	10	120	72000	0.0167
8	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat berat	10	10	1800	72000	0.2500
9	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat berat	10	10	1800	72000	0.2500
10	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Kepentingan tingkat berat	10	10	1800	72000	0.2500
11	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat berat Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat Berat	10	10	1800	72000	0.2500
12	Menyusun rumusan teknis bahan Kebijakan Hubungan Industrial tingkat daerah	2	2	1800	72000	0.0500
13	Menyusun Telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 2	2	2	1800	72000	0.0500
14	Menyusun naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2	2	1800	72000	0.0500
15	Melakukan survey kebutuhan hidup layak dan/atau indeks harga konsumen	2	2	600	72000	0.0167
16	Melakukan evaluasi teknis peraturan bidang Hubungan Industrial tingkat daerah	2	2	600	72000	0.0167

17	Mengembangkan sistem, jejaring dan metode deteksi dini dalam mengelola kerawanan Hubungan Industrial	2	2	600	72000	0.0167
18	Mengembangkan sistem atau jejaring Hubungan Industrial dan jaminan sosial tingkat daerah	2	2	600	72000	0.0167
19	Mendesain pengembangan sistem komunikasi Hubungan Industrial	2	2	600	72000	0.0167
20	Melakukan pembimbingan dan supervisi penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan	2	2	600	72000	0.0167
21	Melakukan pembimbingan dan supervisi pembuatan perjanjian kerja bersama	2	2	600	72000	0.0167
22	Melakukan pendampingan dan fasilitasi pengembangan organisasi pekerja	2	2	120	72000	0.0033
23	Melakukan analisis kerawanan Hubungan Industrial	100	100	120	72000	0.1667
24	"Melakukan evaluasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial"	5	2	600	72000	0.0167
25	Mengevaluasi penyelenggaraan sistem Deteksi Dini dan pencegahan perselisihan/kasus Hubungan Industrial	20	20	120	72000	0.0333
26	Mereviu penyelenggaraan Lembaga Tripartit	100	100	120	72000	0.1667
27	Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan industrial yang diperuntukkan bagi masyarakat atau stakeholders	100	10	120	72000	0.0167
28	Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat berat	90	2	120	72000	0.0033
29	Menyusun Pedoman seleksi Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial	2	2	120	72000	0.0033
30	Laporan pengembangan kinerja Lembaga Tripartit	1	1	120	72000	0.0017
31	Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat/instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat lanjut	90	90	120	72000	0.1500
32	Melakukan layanan audiensi masyarakat atau instansi terkait	100	100	2	72000	0.0028
33	Melakukan pembimbingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Hubungan Industrial	20	20	120	72000	0.0333

34	Melakukan pembimbingan Hubungan Industrial kepada kelompok masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial di luar perusahaan	20	20	120	72000	0.0333
35	Menyusun profil Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung	1	1	120	72000	0.0017
36	Menganalisis profil masyarakat/stakeholders Hubungan Industrial	1	1	120	72000	0.0017
37	Menyusun rencana pembinaan, bimbingan penyuluhan dan monitoring mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	20	20	120	72000	0.0333
38	"Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring mekanisme pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, penanganan mogok kerja di perusahaan atau penutupan perusahaan"	20	20	120	72000	0.0333
39	Menyusun Rencana Pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring penyelenggaraan jaminan sosial dan pembentukan fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan	100	100	120	72000	0.1667
40	Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan dan supervisi pelaksanaan pengupahan di perusahaan	100	100	120	72000	0.1667
41	Menyusun Peta Hubungan Industrial provinsi kategori 1	0	0	0	72000	0.0000
Jumlah				20282		2.4183
Jumlah Pegawai						0

## 7. HASIL KERJA

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Peta Hubungan Industrial provinsi kategori 1	0
2	Dokumen perencanaan pembinaan pelaksanaan pengupahan	100
3	Dokumen perencanaan Pembinaan bidang jaminan sosial dan pembentukan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh	100
4	Dokumen perencanaan Pembinaan bidang Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Penanganan mogok kerja dan/atau penutupan perusahaan	20
5	Dokumen perencanaan bidang pembinaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	20
6	"Profil masyarakat atau stakeholders hubungan industrial"	1
7	Profil Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial yang terverifikasi	1
8	Laporan hasil pembinaan masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial	20

9	Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Hubungan Industrial	20
10	Laporan hasil audiensi bidang Hubungan Industrial	100
11	Rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat lanjut	90
12	Laporan pengembangan kinerja Lembaga Tripartit	1
13	Dokumen Pedoman seleksi Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial	2
14	Laporan hasil pengendalian unjuk rasa tingkat berat	90
15	"Naskah publikasi bidang Hubungan Industrial"	100
16	Dokumen hasil rewi dan rekomendasi penyelenggaraan Lembaga Tripartit	100
17	Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan sistem deteksi dini atau pencegahan perselisihan hubungan industrial	20
18	"Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang terverifikasi"	5
19	Laporan hasil penanganan keluhan-kesah bidang Hubungan Industrial	100
20	Laporan hasil pendampingan dan fasilitasi pengembangan organisasi pekerja	2
21	Laporan hasil pembinaan pembuatan perjanjian kerja bersama	2
22	Laporan hasil pembinaan dan dokumen sistem struktur dan skala upah di perusahaan	2
23	Dokumen pengembangan sistem komunikasi Hubungan Industrial	2
24	Laporan pengembangan sistem dan jejaring Hubungan Industrial tingkat daerah	2
25	Laporan pengembangan sistem dan jejaring deteksi dini terintegrasi	2
26	Naskah hasil evaluasi peraturan perundangan tingkat daerah terkait Hubungan Industrial	2
27	Laporan hasil survey kebutuhan hidup layak dan indeks harga konsumen	2
28	Naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2
29	"Naskah telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 2"	2
30	Dokumen panduan / naskah akademis bahan kebijakan hubungan industrial tingkat daerah	2
31	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat Berat	10
32	Dokumen mediasi penyelesaian perselisihan Kepentingan tingkat Berat	10
33	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat Berat	10
34	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat buruh tingkat Berat	10
35	Dokumen Perjanjian Bersama mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat berat	10
36	Dokumen mediasi pencegahan mogok kerja/ penutupan perusahaan tingkat berat	10
37	Laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau Mahkamah Agung	10
38	Laporan hasil pendampingan hubungan industrial terintegrasi	10
39	Laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan negeri	10

40	Laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan hubungan industrial	10
41	Laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di kepolisian atau penyidik PNS	10

## 8. BAHAN KERJA

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas
1	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	Penyusunan Peta Hubungan Industrial provinsi kategori 1
2	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	Penyusunan rencana pembinaan, penyuluhan dan supervisi pelaksanaan pengupahan di perusahaan
3	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	Penyusunan Rencana Pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring penyelenggaraan jaminan sosial dan pembentukan fasilitas Kesejahteraan pekerja di Perusahaan
4	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	"Penyusunan rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring mekanisme pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, penanganan mogok kerja di perusahaan atau penutupan perusahaan"
5	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	Penyusunan rencana pembinaan, bimbingan penyuluhan dan monitoring mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
6	Peraturan perundang-undangan, Naskah Perjanjian Kerja, kelengkapan berkas	Analisis profil masyarakat/stakeholders Hubungan Industrial
7	Peraturan perundang-undangan, Naskah Peraturan Perusahaan dan kelengkapan berkas	Penyusunan profil Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung
8	Peraturan perundang-undangan, Naskah Perjanjian Kerja Bersama dan kelengkapan berkas	Pembimbingan Hubungan Industrial kepada kelompok masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial di luar perusahaan
9	Peraturan perundang-undangan, Naskah perjanjian pemborongan pekerjaan penyedia jasa pekerja/buruh dan kelengkapan berkas	Pembimbingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Hubungan Industrial
10	Peraturan perundang-undangan, Materi pembinaan	Pelayanan audiensi masyarakat atau instansi terkait
11	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Melakukan pengembangan kinerja Lembaga Tripartit
12	Peraturan perundang-undangan, rencana kegiatan dan anggaran	Menyusun Pedoman seleksi Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial
13	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Pengendalian unjuk rasa tingkat berat
14	Peraturan perundang-undangan, Profil dan sarana hubungan industrial perusahaan	Penyusunan naskah penyebarluasan informasi hubungan industrial yang diperuntukkan bagi masyarakat atau stakeholders
15	Peraturan perundang-undangan, naskah perjanjian kerja	Reviu penyelenggaraan Lembaga Tripartit
16	Peraturan perundang-undangan, Naskah Peraturan Perusahaan dan PKB	Evaluasi penyelenggaraan sistem Deteksi Dini dan pencegahan perselisihan/kasus Hubungan Industrial

17	Peraturan perundang-undangan, Naskah Perjanjian Kerjasama Industrial"	"Evaluasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mekanisme Pengadilan Hubungan
18	Peraturan perundang-undangan, form deteksi dini	Analisis kerawanan Hubungan Industrial
19	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Pendampingan dan fasilitasi pengembangan organisasi pekerja
20	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas, naskah perjanjian kerja bersama	Pembimbingan dan supervisi pembuatan perjanjian kerja bersama
21	Peraturan perundang-undangan, susunan materi, daftar perusahaan	Pembimbingan dan supervisi penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan
22	Peraturan perundang-undangan, data sarana hubungan industrial perusahaan	Pendesainan pengembangan sistem komunikasi Hubungan Industrial
23	Peraturan perundang-undangan, data sarana hubungan industrial perusahaan	Pengembangan sistem atau jejaring Hubungan Industrial dan jaminan sosial tingkat daerah
24	Peraturan perundang-undangan, laporan hasil deteksi dini	Pengembangan sistem, jejaring dan metode deteksi dini dalam mengelola kerawanan Hubungan Industrial
25	Peraturan perundang-undangan, data sarana hubungan industrial perusahaan	Evaluasi teknis peraturan bidang Hubungan Industrial tingkat daerah
26	Peraturan perundang-undangan, form survey kebutuhan hidup layak, data indeks harga konsumen	Survey kebutuhan hidup layak dan/atau indeks harga konsumen
27	Peraturan perundang-undangan	Penyusunan naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
28	Peraturan perundang-undangan	Penyusunan Telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 2
29	Peraturan perundang-undangan	Penyusunan rumusan teknis bahan Kebijakan Hubungan Industrial tingkat daerah
30	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat berat
31	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Mediasi penyelesaian perselisihan Kepentingan tingkat berat
32	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat berat
33	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas Mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat berat	Mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat berat
34	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	Perumusan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat berat dalam bentuk Perjanjian Bersama
35	Peraturan perundang-undangan, kelengkapan berkas	"Mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat berat"
36	Peraturan perundang-undangan, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Anjuran / Perjanjian Bersama	Supervisi penyelesaian perselisihan perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Pengadilan hubungan industrial tingkat pertama/Mahkamah Agung dan tindak lanjutnya
37	Peraturan perundang-undangan, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Anjuran / Perjanjian Bersama	Pendampingan Hubungan Industrial terintegrasi pasca terjadinya kasus Hubungan Industrial berdampak wilayah/ nasional

38	Peraturan perundang-undangan, Risdalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Anjuran / Perjanjian Bersama	Penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan negeri
39	Peraturan perundang-undangan, Risdalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Anjuran / Perjanjian Bersama	Penugasan sebagai saksi ahli dalam dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan hubungan industrial
40	Peraturan perundang-undangan, Risdalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Anjuran / Perjanjian Bersama	Penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara hubungan Industrial berdampak perusahaan di kepolisian/ penyidik PNS

9. PERANGKAT KERJA

No.	Perangkat Kerja	Digunakan Dalam Tugas
-----	-----------------	-----------------------

10. Tanggung Jawab

No.	Uraian
1	a. Terselenggaranya pembinaan hubungan industrial ; b. Terselenggaranya Pengembangan hubungan industrial; c. Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial.

11. WEWENANG

No.	Uraian
1	a. Meminta data sarana hubungan industrial perusahaan; b. Memberikan pembinaan hubungan industrial; c. Mengembangkan sarana hubungan industrial; d. Memanggil para pihak dan saksi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial; e. Memberikan Anjuran Tertulis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

12. KORELASI JABATAN

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1	Kepala Dinas	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
2	Sekretaris Dinas	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
4	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Koordinasi dan kerjasama
5	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama
6	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Koordinasi dan kerjasama
7	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Koordinasi dan kerjasama
8	APINDO	Perangkat Daerah lainnya	Koordinasi dan kerjasama
9	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Perangkat Daerah lainnya	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama
10	Dirjen PHI Jamsos	Kemnaker RI	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama



11	Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Koordinasi dan kerjasama
----	----------------------------------	---	--------------------------

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No.	Aspek	Faktor
-----	-------	--------

14. RISIKO BAHAYA

No.	Nama Resiko	Penyebab
-----	-------------	----------

15. SYARAT JABATAN

- a. Keterampilan Kerja :
- b. Bakat Kerja :
- c. Tempramen Kerja :
- d. Minat Kerja :
- e. Upaya Fisik :
- f. Kondisi Fisik :
  - 1) Jenis Kelamin :
  - 2) Umur :
  - 3) Tinggi Badan :
  - 4) Berat Badan :
  - 5) Postur Badan :
  - 6) Penampilan :
  - 7) Keadaan Fisik :
- g. Upaya Fisik :

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : **Baik/Sangat baik**

17. KELAS JABATAN : **0**

Mengetahui Atasan Langsung

Kabupaten Purwakarta, 04 Apr 2025 10:22  
Kepala Dinas

(.....)

(.....)